

**PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK PADA ORGANISASI KEPEMIMPINAN
SISWA “LKS” KOTA PALEMBANG MELALUI APLIKASI LAPOR**

***INCREASING PUBLIC PARTICIPATION IN THE PALEMBANG CITY
"LKS" STUDENT LEADERSHIP ORGANIZATION
THROUGH THE LAPOR APPLICATION***

Muhammad Qur'anul Kariem*, Ahmad Naufal Fahrezi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

*Email: mquranul@uigm.ac.id

(Diterima 14-02-2023; Disetujui 14-03-2023)

ABSTRAK

Partisipasi publik yang rendah di masyarakat menjadi hal yang selalu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pelajar sebagai generasi muda menjadi pihak yang harus didorong sebagai *pioneer* untuk dapat meningkatkan partisipasi publik. Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah metode sinkronus yang dilakukan secara daring. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pelajar SMA tentang urgensi partisipasi publik bagi pemerintahan serta peningkatan keterampilan penggunaan aplikasi “LAPOR”, hal tersebut menjadi modal awal yang berdampak pada peningkatan partisipasi publik pelajar SMA.

Kata kunci: Partisipasi, LAPOR, Pemerintah

ABSTRACT

Low public participation in society is something that always gets the spotlight from various parties. Students as the younger generation are parties who must be encouraged as pioneers to be able to increase public participation. The method used in this training activity is a synchronous method that is carried out online. The result of this community service activity is that there is an increase in the knowledge of high school students about the urgency of public participation for the government and an increase in the skills of using the "LAPOR" application, this is the initial capital that has an impact on increasing public participation of high school students.

Keywords: Partisipation, LAPOR, Government

PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi publik akan menjadi input bagi pemerintahan sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Menurut Ombudsman Republik Indonesia, partisipasi publik masyarakat masih rendah karena disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu pertama standar pelayanan yang dirumuskan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kedua sarana pengaduan tidak dimiliki oleh instansi, ketiga adalah tindaklanjut yang masih minim dari aduan masyarakat, keempat adalah masyarakat memiliki ketakutan apabila dianggap salah melapor (ombudsman.go.id, 2020). Oleh karena itu, partisipasi publik harus didorong agar masyarakat dapat mendapatkan timbal balik (*feedback*) yang seimbang. Kelompok pemuda, terutama pelajar, menjadi bagian strategis dari masyarakat yang harus didorong agar dapat menyampaikan

partisipasi dengan baik. Pelajar memiliki kemampuan dasar yang baik yaitu penggunaan teknologi informasi sebagai modal awal agar dapat berperan untuk berpartisipasi.

Mono & Samaloisa (2022) dalam artikelnya menyatakan bahwa pemerintah berhasil mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk terus didorong bagi pemerintahan. Untuk menumbuhkan partisipasi publik diperlukan proses dan waktu yang tidak instan, komitmen pemerintah menjadi jaminan penting untuk hal tersebut. Firdaus (2020) juga menekankan pentingnya penguatan partisipasi publik sebagai upaya untuk menekan korupsi. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa partisipasi publik menempati titik strategis dalam pemerintahan. Artikel yang ditulis oleh Sururi (2019) juga menyatakan untuk mendapatkan mencapai keberhasilan tingkat partisipasi publik, harus ada pengembangan dan pendekatan sumber daya lokal serta kemandirian masyarakat.

Kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat yang baik, akan dapat mewujudkan partisipasi publik, tidak hanya pada peningkatan kapasitas pemerintah, namun peran serta masyarakat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan (Parlindungan, 2019). Artinya bahwa, tanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi publik harus berimbang dalam dua sisi, dimana selama ini dianggap pemerintah lah yang harus paling bertanggungjawab apabila partisipasi publik minim.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruhana (2019) menemukan bahwa partisipasi yang cenderung diminati oleh masyarakat adalah partisipasi kolaboratif dan pemberdayaan dengan aktor yang berkolaborasi dengan publik, hal ini akan membuat pemerintah nyaman dan juga dapat mengakomodasi aspirasi publik untuk menciptakan demokratisasi yang bertujuan memperkuat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, bahwa partisipasi publik memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik di pemerintah Kota Palembang, tentunya terdapat berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Minimnya partisipasi publik di masyarakat menjadi hal yang kurang baik bagi optimalisasi dan evaluasi kinerja pemerintah. Pelajar SMA/SMK di Kota Palembang yang merupakan bagian dari generasi muda perlu dituntut untuk dapat meningkatkan partisipasi publik. Sebagian dari pelajar-pelajar terbaik di Kota Palembang tergabung dalam Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) Kota Palembang yang merupakan binaan dari pemerintah. Pelajar khususnya yang tergabung dalam organisasi LKS Kota Palembang, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam meningkatkan partisipasi publik, namun faktor minimnya pengetahuan dan keterampilan

untuk menyampaikan partisipasi menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi publik pelajar SMA/SMK di Kota Palembang salah satunya melalui Pelatihan Aplikasi Laporan untuk Pemerintah Kota Palembang.

BAHAN DAN METODE

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan bekerjasama dengan Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa (PB IKA LKS) Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah dengan metode sinkronus yang dilaksanakan secara daring (online) dengan menggunakan aplikasi CloudXMeeting dengan sistem ceramah, tanya jawab dan praktik. Pelatihan dilakukan oleh pemateri kepada 31 peserta dari siswa-siswi dari berbagai SMA/SMK Kota Palembang yang tergabung dalam LKS Kota Palembang. Pelatihan dilakukan dengan cara melalui penyampaian materi dasar terkait dengan filosofi dan urgensi partisipasi publik kepada pemerintah kota Palembang, dan dilanjutkan praktik penggunaan aplikasi laporan aplikasi, pada pilihan menu pengaduan dan aspirasi.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelatihan yang dilaksanakan yaitu menggunakan google form dengan sistem pemberian pre-test sebelum penyampaian materi dan dilanjutkan dengan pemberian *post-test* setelah penyampaian materi oleh narasumber. Hasil dari *pre-test* dan *post-test* akan diperbandingkan apakah terdapat peningkatan pengetahuan terkait dengan pelayanan publik serta peningkatan keterampilan terkait dengan penggunaan aplikasi laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

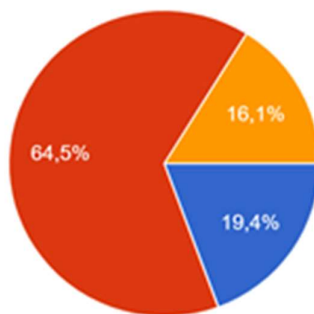
Peserta pelatihan dari siswa-siswi SMA/SMK yang tergabung dalam Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) Kota Palembang pada awalnya menyatakan 48,4% bahwa partisipasi publik sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelajar akan partisipasi publik sesungguhnya telah mencapai taraf yang cukup baik, namun data ini juga belum menunjukkan angka mayoritas untuk menempatkan partisipasi publik sebagai sesuatu yang sangat penting. Pada indikator terkait dengan pengetahuan pelajar tentang bentuk partisipasi publik, sebesar 60% menyatakan kurang mengetahui, dan 6,7% menyatakan tidak mengetahui. Apabila dua hasil ini digabung, terdapat 66,7% pelajar yang belum memiliki pengetahuan terkait dengan apa saja bentuk partisipasi publik.

Angka tersebut sangat tinggi (mayoritas) dan sesungguhnya mencerminkan kondisi yang tidak ideal. Ketidaktahuan pelajar terkait dengan bentuk partisipasi publik dikonfirmasi dengan data minimnya pelajar yang pernah menyampaikan aspirasi dan atau pengaduan.

Hanya 36,7% pelajar pernah menyampaikan aspirasi dalam berbagai bentuk, dan hanya 25,8% pelajar yang pernah menyampaikan pengaduan.

Lebih rendahnya pelajar yang pernah menyampaikan pengaduan daripada yang pernah menyampaikan menjadi masalah yang harus diselesaikan. Penyampaian pengaduan memang membutuhkan usaha yang lebih daripada penyampaian aspirasi, stigma negatif terhadap pelapor akan adanya ancaman atau intimidasi menjadi faktor penyebab hal tersebut.

Ditinjau dari aspek keinginan pelajar untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan, terdapat total 80,6% menyatakan keinginan mereka. Namun, berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, pelajar yang pernah menyampaikan aspirasi ataupun pengaduan hanya di bawah 40%. Artinya masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi dari pelajar yang berkeinginan untuk menyampaikan aspirasi ataupun pengaduan dengan yang dapat mengimplementasikan keinginannya tersebut. Hal itu dilatarbelakangi oleh faktor minimnya pengetahuan pelajar SMA/SMK untuk menyampaikan keinginannya tersebut. Kondisi tersebut juga dikonfirmasi melalui data yang menunjukkan bahwa sebanyak 64,5% pelajar kurang mengetahui, dan 16,1% pelajar tidak mengetahui tata cara untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.



Gambar 1. Diagram Hasil mayoritas pelajar tidak mengetahui tata cara menyampaikan aspirasi dan pengaduan

Pelajar SMA/SMK yang tergabung pada LKS Kota Palembang juga meyakini bahwa dengan menyampaikan aspirasi dan pengaduan akan membuat pemerintah kota Palembang semakin baik, hal ini dibuktikan dengan data responden sebesar 90% (gabungan data sangat setuju dan setuju). Artinya bahwa kesadaran akan menyampaikan partisipasi publik sesungguhnya sudah tinggi, dan juga persepsi bahwa hal tersebut dapat membuat kinerja pemerintah semakin baik. Pada konteks pengetahuan pelajar mengenai web atau aplikasi LAPOR sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan, pelajar SMA/SMK yang tergabung pada LKS Kota Palembang menyatakan bahwa 93,4% tidak mengetahui terkait aplikasi tersebut, dan yang mengetahui hanya ada pada persentase 6,7%.

Data ini kembali mengkonfirmasi bahwa rendahnya pelajar SMA/SMK yang pernah menyampaikan aspirasi dan pengaduan dikarenakan pada umumnya mereka tidak mengetahui saluran tersebut, seperti halnya aplikasi LAPOR Kondisi ini menjadi catatan yang kurang positif, mengingat LAPOR merupakan web dan aplikasi resmi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penanggungjawab di setiap pemerintah daerah. Hal tersebut diperparah dengan minimnya pengetahuan pelajar SMA/SMK yang memahami cara untuk menyampaikan aspirasi pengaduan melalui aplikasi LAPOR, dimana data menunjukkan sebesar 93,3% responden tidak mengetahui tata cara penggunaannya. Aplikasi LAPOR yang belum banyak dikenal oleh pelajar berkorelasi dengan tingkat pengetahuannya untuk menggunakan aplikasi tersebut yang masih minim.

Maka dari itu, pelatihan penggunaan aplikasi LAPOR kepada pelajar SMA/SMK yang tergabung di LKS Kota Palembang menjadi sangat penting, mengingat dari berbagai uraian data yang dihimpun melalui *pre-test* menunjukkan hasil yang kurang positif. Peningkatan partisipasi publik siswa SMA/SMK melalui pelatihan aplikasi LAPOR dilakukan dengan metode sinkronus secara daring melalui aplikasi CloudXMeeting.

Pemateri menyampaikan materi mengenai urgensi partisipasi publik dalam negara demokrasi, dimana partisipasi publik yang tinggi dapat berdampak pada optimalisasi dan evaluasi kinerja pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi, terkhusus di kota Palembang. Pemateri juga menyampaikan berbagai contoh studi kasus dalam pelayanan publik dan pembangunan yang membutuhkan partisipasi publik. Sebagai contoh terkait kasus pelayanan publik, pelayanan pembuatan KTP Elektronik yang menurut peraturan perundang-undangan gratis atau tidak dikenakan biaya pelayanan, namun seringkali terdapat pungutan liar (*pungli*) dalam mendapati pelayanan tersebut dengan berbagai dalih dan alasan. Sebagai contoh terkait kasus pembangunan, apabila tahun tidak mendapatkan penanganan dan mengakibatkan banyak masalah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi untuk pembangunan jalan tersebut.

Pada sesi terakhir, pemateri memperkenalkan mengenai aplikasi LAPOR langsung melalui web, serta memberikan penjelasan terkait penyampaian aspirasi dan pengaduan melalui aplikasi tersebut. Setelah itu, diadakan sesi tanya jawab yang dinamis dari pemateri dan peserta, dan mengisi formulir *post-test* untuk mengukur hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Hasilnya, terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada beberapa indikator yang telah ditetapkan. Pertama, terdapat peningkatan kesadaran para pelajar SMA/SMK yang tergabung dalam LKS Kota Palembang, yang menyatakan bahwa partisipasi publik menjadi suatu hal yang sangat penting, dimana sebelum pelatihan

dilakukan yang menganggap hal tersebut sangat penting hanya sebesar 48,4% meningkat menjadi 81,8%, atau terdapat peningkatan sebesar 33,4%.

Pada indikator selanjutnya, 66,7% pelajar yang sebelumnya tidak mengetahui bentuk partisipasi publik, persentase ketidaktahuannya menurun cukup signifikan menjadi 18,2%. Artinya bahwa pelajar mulai mengetahui bentuk-bentuk dari partisipasi publik. Kondisi tersebut secara langsung juga mempengaruhi keinginan pelajar untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Terdapat peningkatan pelajar yang sangat ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan, dari sebelumnya 25,8% menjadi 31,8%.

Data selanjutnya menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan siswa terkait dengan tata cara menyampaikan aspirasi dan pengaduan, dari yang hanya 19,4% menjadi 77,3% atau meningkat sangat signifikan yaitu 57,9%. Peningkatan pengetahuan siswa terkait tata cara penyampaian aspirasi dan pengaduan menjadi sangat penting karena sebagai modal awal untuk menyampaikan partisipasi publik yang baik. Indikator lain, terkait dengan persepsi siswa bahwa partisipasi publik dapat membuat pemerintah kota Palembang semakin baik, juga mengalami peningkatan. Sebelumnya hanya terdapat 33,3% responden, setelah pelatihan meningkat menjadi 54,5%.

Aplikasi LAPOR yang sebelumnya mayoritas tidak dikenali oleh pelajar, terdapat peningkatan yang sangat signifikan sebesar 70,6%. Hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi terkait dengan aplikasi LAPOR harus terus dilakukan karena minimnya informasi terkait dengan hal tersebut di kalangan pelajar SMA/SMK. Pada indikator terakhir, sebelum mengikuti pelatihan hanya terdapat 6,7% pelajar yang mengetahui dan memahami tata cara penyampaian aspirasi dan pengaduan melalui aplikasi LAPOR. Setelah mengikuti pelatihan, keterampilan siswa untuk menggunakan aplikasi tersebut menjadi lebih baik, dengan persentase 77,3%. Hal ini berarti pelatihan yang dilakukan secara umum dapat memberikan dampak keterampilan untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui aplikasi LAPOR yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan penggunaan aplikasi LAPOR pada pelajar SMA/SMK yang tergabung di LKS Kota Palembang terbukti efektif untuk memberikan pengetahuan dasar terkait dengan urgensi partisipasi publik dalam pemerintahan. Selain itu, pelajar yang sebelumnya tidak mengenali dan memahami aplikasi LAPOR dan tata cara penggunaannya, meningkat signifikan keterampilannya untuk hal tersebut. Pengetahuan tentang urgensi partisipasi

publik bagi pemerintahan serta keterampilan penggunaan aplikasi LAPOR akan dapat memberikan dampak pada peningkatan partisipasi publik siswa.

Saran untuk pengabdian ini bahwa, pelajar yang tergabung pada LKS Kota Palembang yang telah mendapatkan pelatihan terkait dengan aplikasi LAPOR, hendaknya dapat menjadi pelopor bagi pelajar lainnya untuk dapat secara bersama-sama meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab untuk pembangunan daerah melalui partisipasi publik

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Indo Global Mandiri yang telah mendanai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta kepada mitra Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Latihan Kepemimpinan Siswa Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, F. R. (2020). Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 282-293.
- Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik. <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--menumbuhkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik>
- Mono, A., & Samaloisa, R. . (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 113-121. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.259>
- Parlindungan, R. (2019). Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi. *Jurnal Trias Politika*, 3(1), 10-21.
- Ruhana, A. S. (2019). Demokratisasi Partisipasi Publik Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. *Dialog*, 42(2), 125-134.
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang). *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 110-121.